BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia berhak untuk hidup sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial. Manusia juga berhak untuk mendapatkan akses untuk sumber daya kesehatan tersebut. Hal ini sudah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023⁽¹⁾. Pernyataan ini sejalan dengan World Health Organization (WHO) yang menyatakan bahwa hak untuk kesehatan adalah hak fundamental, pokok, atau mendasar. “*Leaving no one behind*”, WHO berprinsip untuk memberikan kesempatan yang setara untuk semua orang dalam mendapatkan kesehatan⁽²⁾.

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu usaha Indonesia untuk menyelesaikan Sustainable Development Goals (SDGs) nomor tiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera yang bertujuan untuk mencapai *universal health coverage* (UHC) atau semua orang memiliki akses ke layanan kesehatan yang diperlukan⁽³⁾. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program pemerintah agar masyarakat Indonesia memiliki akses ke pelayanan kesehatan yang layak⁽⁴⁾. JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa penyelenggara jaminan sosial, salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan⁽⁵⁾. Kepesertaan BPJS dibedakan menjadi dua yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). Peserta PBI terdiri dari fakir miskin dan kurang mampu yang standar kehidupannya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No. 146 Tahun 2013⁽⁶⁾.

Sebuah wilayah dikatakan sudah mencapai UHC jika jumlah peserta JKN-nya mencapai 95% dari total penduduk di wilayah tersebut⁽⁷⁾. Cakupan JKN di Indonesia sudah mencapai 96.06% pada bulan Mei 2024⁽⁸⁾. Walaupun Indonesia dikatakan sudah mencapai UHC, namun Indonesia belum mencapai target dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yaitu 98% pada tahun 2024⁽⁹⁾. Pengguna JKN di Sumatera Barat pada tahun 2023 mencakup 66,45% penduduk.⁽¹⁰⁾ Hal ini berarti Sumatera Barat belum mencapai UHC karena kepesertaan JKN belum mencapai 95% dari jumlah penduduk wilayah menurut data yang tercatat pada tahun 2023.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tiaraningrum pada tahun 2014 di Surakarta, informasi yang diterima oleh masyarakat merupakan salah satu motivasi keikutsertaan JKN⁽¹¹⁾. Hal ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023 bahwa 1,43% penduduk di Sumatera Barat yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan tidak menggunakan JKN/Jamkesda untuk rawat jalan karena tidak mengetahui cara memanfaatkan jaminan kesehatan⁽¹²⁾.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Harahap dan Susilawati di Puskesmas Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Painan, Sumatera Barat, ditemukan hasil bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara status kepesertaan JKN dengan pengetahuan masyarakat di wilayah kerja puskesmas tersebut. Kepesertaan JKN di daerah tersebut mencapai 64% PBI dan 24% non-PBI. Namun masih ada masyarakat di daerah tersebut yang belum terjamin kesehatannya melalui asuransi kesehatan⁽¹³⁾.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ovany dkk di Puskesmas Panarung, pemanfaatan jaminan kesehatan oleh masyarakat di wilayah kerja tersebut masih kurang karena kurang mendapatkan informasi tentang jaminan kesehatan. Pada penelitian itu juga didapatkan hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan dengan motivasi⁽¹⁴⁾.

BPJS memiliki kewajiban untuk menginformasikan mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan kewajiban kepada pesertanya⁽¹⁵⁾. Salah satu usaha yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan adalah dengan menghadirkan aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN diharapkan dapat mempermudah pengguna untuk pendaftaran, melihat informasi mengenai status kepesertaannya, mendapat layanan FKTP dan FKTRL, dan memberikan kritik atau saran⁽¹⁶⁾. Di aplikasi Mobile JKN juga terdapat menu Info Program JKN yang berisi informasi mengenai pendaftaran, sanksi, info cara pembayaran, hak dan kewajiban, serta fasilitas dan manfaat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dahliana pada pasien Rumah Sakit Wiyung Sejahtera yang merupakan peserta JKN non-PBI, 39,5% responden penelitian tersebut mendapatkan informasi mengenai JKN dari TV/radio, 18,6% dari teman, 16,2% dari keluarga, 13,9% dari tetangga, dan 11,6% dari koran/brosur⁽¹⁷⁾.

Kabupaten Agam menduduki posisi ke-12 dari 20 kabupaten/kota dengan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional terbanyak di Sumatera Barat pada tahun 2023, yaitu 64,35%⁽¹⁸⁾. Namun didapatkan 0,21% penduduk di Kabupaten Agam yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan sebelum data diambil tidak berobat jalan dengan alasan tidak punya biaya⁽¹⁹⁾. Padahal layanan kesehatan tidak dipungut biaya jika pasien yang berobat merupakan anggota JKN. Peserta JKN juga tidak wajib dipungut biaya jika pesertanya merupakan golongan fakir miskin dan tidak mampu. Seharusnya tidak memiliki biaya bukan lagi alasan seseorang tidak berobat jika sudah mengetahui tentang hak dan manfaat kepesertaan JKN.

Kecamatan Lubuk Basung merupakan kecamatan yang memiliki fasilitas kesehatan cukup lengkap dibandingkan kecamatan lainnya di Kabupaten Agam. Tercatat pada tahun 2023 terdapat satu Rumah Sakit Umum Daerah, satu Rumah Sakit Khusus, satu Puskesmas Rawat Inap, satu Puskesmas Non Rawat Inap, lima klinik pratama, dan 101 posyandu di Kecamatan Lubuk Basung⁽²⁰⁾. Kecamatan Lubuk Basung memiliki 5 nagari yaitu Nagari Manggopoh, Nagari Garagahan, Nagari Kampuang Tengah, Nagari Kampung Pinang, dan Nagari Lubuk Basung. Nagari Lubuk Basung merupakan nagari dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan nagari lainnya di Kecamatan Lubuk Basung yaitu 40.733 jiwa atau 48% dari Kecamatan Lubuk Basung. Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di Nagari Lubuk Basung juga lebih banyak dibandingkan dengan nagari lainnya di Kecamatan Lubuk Basung⁽²¹⁾. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan kepada peserta BPJS non-PBI yang sedang rawat jalan di Puskesmas Lubuk Basung, 43,8% responden memiliki pengetahuan yang kurang baik mengenai JKN⁽²²⁾. Berdasarkan Peraturan Bupati Agam Nomor 27 tahun 2020, dana kapitasi JKN FKTP Lubuk Basung pada tahun 2020 adalah Rp1.890.110.772,-⁽²³⁾.

Dari uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat Nagari Lubuk Basung mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan masyarakat Nagari Lubuk Basung mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat Nagari Lubuk Basung mengenai JKN.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Nagari Lubuk Basung mengenai hak peserta JKN.
2. Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Nagari Lubuk Basung mengenai kewajiban peserta JKN.
3. Mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat Nagari Lubuk Basung mengenai manfaat kepesertaan JKN.
4. Mengetahui sumber informasi masyarakat Nagari Lubuk Basung mengenai JKN.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti

Seluruh proses dan hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti di bidang terkait. Penelitian ini juga merupakan syarat kelulusan peneliti dalam jenjang pendidikan sarjana di Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

1.4.2 Manfaat Bagi Pemangku Kepentingan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemangku kebijakan untuk menciptakan sistematika penyebaran informasi sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup mengenai JKN.

1.4.3 Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai JKN beserta seluruh hak dan kewajiban yang diperoleh oleh pesertanya.